

**LAPORAN KINERJA  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022  
(11 JANUARI s.d. 14 MARET 2022)**

**3.3.2.4 Komisi IV**

**3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi**

1. Komisi IV DPR RI menyampaikan Draft RUU dan Naskah Akademik tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada Baleg DPR RI dengan surat Nomor 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tanggal 30 November 2021, agar draft RUU dimaksud dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg DPR RI.
2. Komisi IV DPR RI memenuhi undangan Badan Legislasi melakukan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tanggal 20 Januari 2022.

**3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran**

1. **Rapat Kerja**  
-
2. **Rapat Dengar Pendapat**  
-

**3.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan**

**1. Pembentukan Panja (Tahun 2022)**

- a. **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

**Kegiatan Panja:**

Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2022, membahas Rencana Kerja Panitia Kerja.

- b. **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

**Kegiatan Panja:**

Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2022, membahas Rencana Kerja Panitia Kerja.

**c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022):

**Kegiatan Panja:**

-

**d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2022, membahas Rencana Kerja Panitia Kerja.

## **2. Kunjungan Kerja**

### **a. Kunjungan Kerja Masa Reses**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan ke:

#### **1) Provinsi Sulawesi Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 19 s.d. 23 Februari 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Kota Makassar.
- b) PT Huandi Nickel-Alloy, Kabupaten Bantaeng.
- c) Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar Kota Makassar dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- d) PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

#### **a) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kota Makassar.**

- Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Balai Besar KIPM Makassar mencatat total ekspor dari komoditas perikanan pada Tahun 2021 yakni sebanyak 179.180 ton atau setara dengan Rp6,6 Triliun. Komoditas perikanan tersebut didominasi oleh lima komoditas utama yakni rumput laut sebanyak 145.021 ton atau 80,9%, karaginan sebanyak 11.318 ton atau 6,3%, udang vannamei sebanyak 8.068 ton atau 4,5%, gurita sebanyak 3.906 ton atau 2,2%, tuna sebanyak 2.452 ton

atau 1,4%, dan produk perikanan lainnya sebanyak 8.415 ton atau 4,7%. Kelima komoditas tersebut diekspor ke berbagai negara diantaranya China, Vietnam, Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya.

- Sedangkan untuk lalu lintas impor, Balai Besar KIPM Makassar mencatat bahwa terdapat produk impor komoditas perikanan Tahun 2021 yang meliputi induk udang vannamei sebanyak 12.160 ekor yang diimpor dari Hawaii, rajungan 222 ton diimpor dari Tunisia dan 111 ton rajungan diimpor dari Bahrain.
- Selain kegiatan ekspor dan impor, Balai Besar KIPM juga mencatat data lalu lintas domestik keluar dan kedalam komoditas perikanan. Pada tahun 2021 total komoditas perikanan yang dilalulintaskan pada kegiatan domestik keluar yakni sebanyak 50.499 ton atau senilai Rp1,8 Triliun. Komoditas yang mendominasi, antara lain bandeng 40,5%, udang vannamei 21,1%, rumput laut 10,1%, gurita 5,0% dan tuna 3,4%.
- Untuk menjamin komoditas perikanan tersebut bebas dari penyakit ikan karantina dan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Balai Besar KIPM Makassar memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup pengujian.
- Dalam sesi dialog Plt. Kepala BKIPM menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp219,14 M untuk pelaksanaan program prioritas KKP di Sulawesi Selatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya adalah jumlah kantor yang tersebar jauh satu dan lainnya.
- Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas capaian yang telah diraih dan meminta Balai Besar KIPM Makassar agar mempertahankan prestasinya serta terus mendorong peningkatan nilai ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan melalui pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari penanganan hasil perikanan hingga ekspor. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI juga mendukung pelaksanaan program prioritas KKP di Sulawesi Selatan serta terus mendorong adanya penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk anggaran KKP di Sulawesi Selatan.

#### **b) PT Huadi Nickel-Alloy, Kabupaten Bantaeng**

- PT Huadi Nickel-Alloy adalah perusahaan yang saat ini memulai investasinya di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel, merupakan perusahaan *joint venture* antara Indonesia dan China. Kepemilikan 49% (empat puluh sembilan persen) saham dimiliki oleh Indonesia dan 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh China.

- Sumber bahan baku nikel, PT Huadi Nickel Alloy memperoleh suplai bahan baku nikel dari tambang nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kapasitas existing smelter PT Huadi sebesar 50.000 ton/tahun.
- Aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasional PT HNI. Komisi IV DPR RI meminta PT HNI memindahkan limbah yang menumpuk tinggi agar tidak longsor ke jalan serta polusi (debu) yang berasal dari limbah perusahaan tidak mengganggu masyarakat. Selanjutnya Komisi IV juga meminta agar PT Huadi segera mengirimkan dokumen lingkungan kepada Komisi IV DPR RI.

**c) Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar Kota Makassar dan PT Pupuk Indonesia (Persero)**

- Agar Pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan.
- Mendorong Pemerintah untuk memberi penugasan kepada Bulog untuk berperan mengatasi kelangkaan minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Perum Bulog juga didorong untuk bekerja sama dengan PNS serta tetap menjaga kualitas beras.
- PT Pupuk Indonesia agar meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, juga memperbaiki sistem pengawasan, antara lain melalui penerapan digitalisasi serta meminta agar produsen pupuk tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melanggar.
- Mengapresiasi kegiatan agro solution yang dicanangkan oleh PT Pupuk Indonesia dan meminta agar cakupannya diperluas serta bekerja sama dengan petani dan Eselon I teknis terkait Kementerian Pertanian.
- Mengapresiasi bantuan *Rice Milling Unit* (RMU) di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengkritisi pasokan dan harga kedelai yang sangat tinggi.
- PT Pupuk Indonesia akan memperkuat tenaga di lapangan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan terkait kegiatan agro solution. PT Pupuk Indonesia telah mencanangkan target sebanyak 252.000 ha untuk tahun 2022 di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra produksi.
- Terkait minyak goreng, Perum Bulog menyampaikan tidak mendapatkan penugasan, begitu pula dengan CBP, Perum Bulog bergantung kepada penugasan untuk melakukan penyaluran.
- Dalam hal permasalahan kedelai, Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan untuk meningkatkan produksi tidak

semuanya berasal dari skema APBN namun juga dari KUR, sehingga diharapkan akan lebih banyak yang menanam.

**d) PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

- PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 hektar di Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari Kota Makassar.
- Tonasa mengisi kebutuhan semen di daerah Indonesia Bagian Timur, didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar luas serta diperkuat oleh sembilan unit pengantongan semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan.
- Dari segi pengelolaan lingkungan, Semen Tonasa menerapkan sistem manajemen berbasis sertifikasi ISO.
- Meminta PT Semen Tonasa untuk mengelola limbah dengan baik dan menjaga agar pasir atau debu batubara tidak terbang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
- Meminta PT Semen Tonasa agar memastikan dana CSR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran utamanya dalam perbaikan lingkungan.

**2) Provinsi Sumatera Utara**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 21 s.d. 25 Februari 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Kota Medan.
- b) Lokasi Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove 2021 Nelayan Indah, Kota Medan.
- c) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kota Medan.
- d) Komplek Pergudangan Bulog Pulo Brayon Darat II, Kota Medan.
- e) Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu.

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan**

- Permasalahan yang ada di PPS Belawan, antara lain:
  - Aset lahan saat ini merupakan milik PT Perindo.
  - Adanya tumpang tindih sistem pengelolaan pelabuhan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Perindo selaku BUMN, sehingga pelayanan kurang optimal karena disinyalir hanya memungut sewa tempat tanpa mempertimbangkan roadmap pelabuhan dan tanpa ada perbaikan sarpras yang signifikan.
  - Terjadinya Banjir saat pasang atau musim tertentu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap aset PPS Belawan dapat dikembalikan pengelolaannya.

- Pengembangan PPS Belawan ke depan KKP mendapat bantuan pinjaman PHLN dari AFD Perancis untuk mengembangkan PPS Belawan di lahan baru seluas sekitar 28 ha.
- Mitra usaha di PPS Belawan sekitar 30 perusahaan ikan yang selama ini melakukan swadaya terhadap peningkatan sarpras.
- Terkait alat penangkap ikan pukat hela ikan tarik berkantong di PPS Belawan sudah dilarang dan nelayan diarahkan mengganti alat tangkapnya dengan pukat hela yang mata jaringnya lebih besar dan ramah lingkungan.
- Aspirasi/Masukan Masyarakat:  
PPS Belawan sampai saat ini belum dikemas dengan baik bagi kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Master plan yang pernah dibuat belum terlaksana seluruhnya, bahkan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendanaan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan yang dialokasikan oleh Pemerintah, seperti dermaga, panjangnya masih belum mencukupi untuk pelabuhan perikanan kelas samudera (existing: p=154 m), mengingat kapal-kapal yang membongkar hasil tangkapannya cukup banyak jumlahnya per hari, sehingga tidak mencukupi untuk operasional. Demikian juga kondisi kedalaman kolam pelabuhan sangat dangkal antara 0,5 s.d. 1 m, sehingga sangat mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan.
- Harapan PPS Belawan, antara lain:
  - Menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai, karena salah satu kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk meningkatkan operasional pelabuhan serta memajukan kegiatan industri perikanan.
  - Rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dengan cara melakukan penataan fasilitasnya dalam rangka menjawab tantangan dalam pengembangan pelabuhan perikanan pada masa yang akan datang.
  - Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan menjadi *eco fishing port* yang berwawasan lingkungan.
  - HNSI meminta kepada PT Perindo melaksanakan perbaikan sarana prasarana kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dan orientasinya tidak memikirkan keuntungan semata dari hasil sewa lahan yang tinggi dan retribusi pungutan PBB perairan yang dipertanyakan.
  - HNSI meminta adanya pembangunan rumpon sebagai batas wilayah perairan Indonesia dengan negara Malaysia agar nelayan tidak melewati batas dan dapat memastikan tidak melewati jalur perairan negara lain.

- Nelayan Puersine meminta agar PP 85 Tahun 2021 direvisi pungkutanya karena dianggap terlalu besar yang berakibat menurunnya penghasilan nelayan.
- KNTI meminta kebijakan penangkapan terukur berpihak kepada nelayan tradisional dan membenahi ketersediaan BBM bersubsidi yang masih kurang/langka.

**b) Lokasi Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove Kel. Nelayan Indah**

- Fasilitas Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.
- PKPRM Sumatera Utara memiliki lokasi penanaman total seluas 7.559 hektar yang tersebar di 2 (dua) UPT KLHK pada 8 (delapan) kabupaten, 27 kecamatan, dan 54 desa. Kebutuhan bibit/propagul sebanyak 22.688.300 batang dengan kebutuhan tenaga kerja Penanaman melibatkan sebanyak 6.828 orang dan jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan sebanyak 431.766 Hari Orang Kerja (HOK). Dengan keterlibatan kelompok sebanyak 138 kelompok terlibat dalam kegiatan PKPRM yang tersebar di beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
- Aspirasi/Masyarakat Kelompok Budi Daya Khazanah Mangrove Desa Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan:
  - Kelompok memiliki luas penanaman seluas 48 hektar pola tanam *sylvofishery* & pengayaan jumlah bibit 59.400 batang jumlah anggota & hok 30 anggota & 1.620 HOK.
  - Lokasi penanaman mangrove di Kelurahan Nelayan Indah, kondisi awal tahun 70-an merupakan Kawasan Hutan pesisir dengan dominasi tanaman mangrove.
  - Selanjutnya terjadi kerusakan (penebangan liar untuk arang) berlanjut pada tahun 90-an marak dengan penjarahan sehingga merubah fungsi hutan menjadi tambak intensif yang di kelola oleh masyarakat.
  - Kondisi saat ini tambak tersebut tidak berfungsi lagi (produksinya menurun dan irigasinya tambak rusak), dan muncul kesadaran masyarakat untuk menghijaukan kembali lahan desanya dengan cara menanam mangrove dan berlanjut menjadi sasaran Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2021.
  - Kelompok mengharapkan adanya perbaikan saluran air pasang surut di areal tanam mangrove.
  - Meminta dilakukan perbaikan jalan sebagai akses menuju lokasi penanaman mangrove.
  - Kelompok berharap adanya anggaran pemeliharaan pascatanam karena dibutuhkan biaya perawatan agar mangrove bisa tumbuh dengan baik.

- Proses penanaman hingga selesai dibutuhkan waktu selama 2 bulan.
- Upah yang diterima masing-masing anggota kelompok sebesar Rp90.000/orang. Semua dana penanaman masuk melalui rekening kelompok.

### c) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

- BPTP dibangun pada Tahun 1994. BPTP merupakan salah satu dari 65 Satker Pertanian di bawah Balitbangtan. BPTP memiliki 1,8 ha taman inovasi.
- Pada Tahun 2020, BPTP mendapatkan mandat untuk mendukung program *Food Estate* Humbang Hasundutan dengan produksi benih bawang merah, bawang putih, dan kentang (yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara).
- Tahun 2020, sistem integrasi ternak sapi dan padi sangat berdampak positif bagi masyarakat karena berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dimana limbah sapi bisa dimanfaatkan kembali untuk padi, dan jeram padi bisa dimanfaatkan untuk ternak sapi. Hasil beberapa penelitian untuk pengurangan masalah anak-anak stunting yang diharapkan bisa menjadi baik, salah satunya dengan mengkonsumsi nasi dari beras varietas Inpari Nutrizink.
- BPTP memiliki produksi padi dan harus dikombinasi dengan Jarwo Super yang bisa meningkatkan produksi hingga 11-12 ton/ha dan sudah dibuktikan di semua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. BPTP juga memiliki beberapa teknologi seperti Jarwo Super dll dan juga mengembangkan jagung dan kedelai.
- Saat ini petani membutuhkan benih dalam jumlah yang banyak dan Tahun ini BPTP mendapatkan dana yang cukup besar untuk membangun pusat perbenihan hortikultura, sarana produksi, kultur jaringan, dan akan menjadikan pusat edukasi teknologi, pusat perbenihan hortikultura modern.

### d) Komplek Pergudangan Bulog Pulo Brayon Darat II

- Aspirasi Perum Bulog
  - Saat ini persediaan beras di gudang bulog hanya mencapai 1000 ton dari kapasitas sebesar 21 ribu ton, karena pada tahun ini Perum Bulog mendapatkan penugasan (sesuai arahan Rakortas) untuk menyimpan beras sebesar 1 juta ton seluruh Indonesia (sesuai kebutuhan sementara kapasitas gudang yang dimiliki Perum Bulog untuk seluruh Indonesia sebesar 4 juta ton).
  - Perum Bulog mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan outlet yang dapat menyerap beras petani.
  - Tahun lalu, Perum Bulog hanya menyerap 1,2 juta ton karena untuk menyimpan stok cadangan beras Pemerintah. Beras yang disimpan di gudang Sumatera Utara berasal dari Provinsi



Sulawesi Selatan dan NTB. Provinsi Sumatera Utara menghasilkan (baru menyerap 700 ton) tetapi karena Sulawesi Selatan dan NTB produksinya *oversupply* maka dialihkan ke gudang Seluruh Indonesia.

- Beras untuk CBP tidak bisa dijual kecuali untuk 3 aktivitas yaitu ijin dari Kemendag untuk Operasi Pasar/KPSH, ijin dari Kemensos untuk Bencana Alam, serta untuk golongan anggaran. Oleh karena itu, jika outletnya hanya itu, beras akan tersimpan lama dan beresiko untuk dilakukan disposal stok, karena sesuai dengan Permentan, beras yang disimpan oleh Perum Bulog maksimal 4 bulan dan setelahnya harus dilakukan disposal. Oleh karena itu, Perum Bulog membutuhkan metode *revolving stock*.
- Bantuan sosial ada 3 program yaitu program BPNT, program PKH, dan Program BST. Untuk program BPNT seluruhnya boleh mengambil beras dimana saja dan bisa diberikan secara tunai. Kementerian Sosial juga telah mengeluarkan surat untuk memberikan bantuan pangan non tunai secara tunai dan tidak ada penugasan langsung kepada perum bulog.
- Pemerintah memiliki hutang kepada Perum Bulog hampir sebesar Rp5 triliun dan dari Rp3,5-4 triliunnya merupakan hutang Pemerintah untuk program PPKM dan hingga hari ini belum dibayar Pemerintah (jika ingin dibayar maka Kemensos harus merubah Permensos).
- Terkait komoditas minyak goreng, Perum Bulog belum mendapatkan penugasan untuk stabilisasi harga dan stok sehingga konsep penjualan Perum Bulog menggunakan B2B (Medan hanya memiliki stok 5000 liter).
- Dari 1 juta ton yang dimiliki oleh Bulog (stok), stok impor Tahun 2018 masih ada 160 ribu ton. Perum Bulog sudah membuat surat untuk meminta petunjuk untuk dilelang dan tidak ada jawaban dari beras itu. Kondisinya sudah turun mutu dan tinggi susutnya. Disamping itu, beras tersebut tidak layak dikonsumsi. Untuk saat ini Perum Bulog terpaksa membiarkannya karena jika dijual maka disurati Kemendag karena beras tersebut merupakan beras penugasan.
- Kapasitas gudang yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebesar 81 ribu ton tetapi isinya hanya 9000 ton karena target pengadaan hanya 26 ribu ton dan Perum Bulog tidak berani mengambil banyak karena dikhawatirkan busuk (karena tidak ada hilir penyaluran beras). Untuk Seluruh Indonesia, Perum Bulog menargetkan 1,6 juta ton (pengadaan).
- Perum Bulog membeli beras dengan meminjam kepada Bank dengan bunga komersil yang nilainya sama dengan meminjam uang kepada Bank. Perum Bulog membayar bunga komersil hingga mencapai 1-1,5 Triliun/tahun (ketika stok masih

banyak). Harapan jika Perum Bulog mendapatkan penugasan penyerapan atau impor, Pemerintah juga memberikan dana/modal untuk melaksanakan penugasan tersebut. Disamping itu, saat ini Perum Bulog baru dibayar oleh Pemerintah jika komoditas sudah dijual/keluar.

- **Pupuk Indonesia**

- Provinsi Sumatera Utara memiliki alokasi pupuk subsidi sebesar 382.650 ton. Yang sudah tersalurkan per tanggal 17 Februari 2022 sebesar 34 ribu ton (8,9%). Pupuk Indonesia secara gradual akan menyalurkan bulan demi bulan. Data bulan Februari 2022, total pupuk subsidi terdapat 27.194 ton (222% di atas ketentuan minimum). Untuk urea, stok tersedia 10.471 ton (233% di atas ketentuan minimum), stok pupuk NPK sebesar 8.424 ton (242% dari kebutuhan minimum).
- Tahun 2022, E-RDCK nasional 25 juta ton, alokasi yang disiapkan Pemerintah sesuai anggaran sebesar 9,1 juta ton sehingga Pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani. Terkait dengan maraknya penyelewengan pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Bareskrim untuk mem-*follow up* (PT Pupuk Indonesia membantu mendokumentasi adanya penyelewengan tersebut dan membantu mengetahui sumber kebocoran pupuk tersebut). Sesuai dengan rekomendasi Komisi IV DPR RI, PT Pupuk Indonesia menindak tegas kios/distributor yang melanggar dengan cara menonaktifkan/dipecat. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, penyelewengan pupuk menjadi berkurang dan Pemerintah bisa meningkatkan alokasi untuk petani.
- Saat ini pemeriksaan yang berlangsung sudah dilakukan oleh aparat hukum dan PT Pupuk Indonesia selalu dilibatkan. Upaya PT Pupuk Indonesia untuk mengurangi penyelewengan adalah membuat sistem digitalisasi stok pupuk yang selalu dilaporkan kepada BPK (dari pabrik-lini 2 kabupaten) sehingga diharapkan penelusuran angka penyaluran lebih mudah dan dapat melihat angka yang tidak *balance* tersebut.
- Sejak Tahun 2016-awal 2021, ada 95 kasus penyelewengan. Penyelewengan pupuk bersubsidi dilakukan bervariasi dan paling umum adalah menaikkan HET pupuk subsidi. Untuk tindakan penyelewengan, kasus tersebut hanya bisa menangkap sedikit tersangka. Ada beberapa distributor dan kios yang terlibat dan dipecat. Untuk petani, kasusnya baru terungkap di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2021) dan pupuk Indonesia tidak bisa menindak tegas (hanya bisa membantu aparat hukum, terkait dengan laporan stok, laporan lainnya).

Kasus yang ada saat ini belum tuntas dan masih diproses (masih diusut pengepul pupuk bersubsidi).

- PT Pupuk Indonesia sudah bersepakat dengan distributor dan kios terkait dengan kebutuhan petani hanya bisa dipenuhi 35% sehingga harus menyiapkan pupuk nonsubsidi. Hal tersebut merupakan upaya PT Pupuk Indonesia untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, namun di lapangan yang terjadi terkadang ada isu pemaketan pupuk subsidi dan non subsidi. Sesuai arahan Komisi IV PT Pupuk Indonesia membuka kios komersil 1000-1500 kios (tahun ini) yang tidak sama dengan pupuk subsidi (untuk menjamin kekurangan pupuk subsidi).

#### **e) Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu**

- Aspirasi/masukan Balai Karantina Pertanian
  - Eksportir yang ingin mengirimkan komoditasnya diwajibkan melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dan eksportir bisa mengurus sertifikasi komoditas tersebut melalui online.
  - Balai Karantina Pertanian Sumatera Utara membangun 2 klinik dan 1 *podcase* yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor komoditas pertanian, diantaranya:
    - ✓ Klinik ekspor yang digunakan untuk membedah kepengurusan produk yang akan diekspor.
    - ✓ Klinik perkarantinaan yang digunakan untuk membina masyarakat terkait dengan syarat sertifikasi komoditas. Balai Karantina memiliki target untuk melindungi sumber daya lokal dari hama penyakit.
    - ✓ *Podcase* yang digunakan untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan langkah yang dilakukan untuk melakukan ekspor.
  - Berdasarkan data lalu lintas komoditas pertanian, tercatat adanya peningkatan nilai ekspor pertanian di Tahun 2021 sebesar 14,08%, yaitu ekspor sub sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan di Tahun 2021 mencapai Rp3,867 Triliun (angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian di Tahun 2020 sebesar Rp3,323 Triliun).

### **3) Provinsi Riau**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 11 Maret 2022, dengan objek kunjungan:

- a) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru.
- b) Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau.
- c) Gudang PT Pupuk Indonesia (Persero).

**Temuan hasil kunjungan kerja:**

**a) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru**

- Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya SKIPM Pekanbaru didukung oleh 48 orang ASN, yang terdiri dari 33 PNS dan 13 PPNPN.
- Beberapa masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau dan Staf SKIPM Pekanbaru, antara lain:
  - Wilayah kerja atau wilayah binaan SKIPM di Riau sangat luas dan memiliki permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan jumlah SDM yang banyak. Kondisi SDM di SKIPM saat ini sangat terbatas untuk mengcover semua wilayah setiap hari, sehingga perlu dilakukan sistem shif di beberapa pelabuhan dan lokasi binaan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah SDM yang cukup signifikan agar program dan kegiatan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.
  - Saat ini fasilitas laboratorium yang ada di SKIPM Pekanbaru masih manual dalam pengujian sample ikan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan jumlah sample yang lebih besar untuk menguji bahan berbahaya, kandungan bakteri dan virus. Oleh karena itu, laboratorium yang sudah ada agar diganti dengan yang otomatis yang output pengujian sample bisa keluar sekaligus.
  - Saat ini SKIPM Pekanbaru membawahi wilayah yang luas, namun ada salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang tidak dilayani oleh SKIPM Riau yaitu Bagan Siapi Api yang dilayani SKIPM Tanjung Balai Asahan. Oleh karena itu, untuk kemudahan kordinasi dengan mitra pemerintah daerah dan UPT pusat di daerah lainnya maka UPT Karantina di Provinsi Riau dinaikkan status eselon dari eselon IV menjadi eselon II, setingkat dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

**b) Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau**

- Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau, perusahaan yang sudah mendapatkan izin lokasi sebanyak 231 unit dengan luas 1.834.519,20. Perkebunan yang sudah mendapatkan pelepasan kawasan hutan sebanyak 167 unit dengan luas 1.736.083,83 ha dan data izin usaha perkebunan sebanyak 223 unit dengan luas 1.569.118,73 ha. Total perusahaan yang beroperasi di Riau sebanyak 272 unit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 150 unit dan yang belum memiliki HGU sebanyak 122 unit.

- Gubernur Riau juga menyampaikan daftar kebun yang terbangun dalam kawasan hutan yang sudah mendaftarkan penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memiliki data kebun dalam Kawasan, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya belum melaporkan ke Gubernur Riau dengan berbagai alasan.
- Terkait permasalahan kebun sawit dalam kawasan hutan, Gubernur Riau sudah melakukan berbagai cara untuk mempercepat penyelesaiannya, mulai dari bersurat kepada Menteri LHK dan Menko Bidang Perekonomian serta mengirimkan surat ke semua bupati dan Kantor ATR/BPN untuk meminta data berupa peta dan data-data lainnya. Karena sudah melakukan berbagai macam langkah untuk penyelesaian, Gubernur Riau mengusulkan penyelesaian Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan, antara lain:
  - Percepatan pelaksanaan identifikasi usaha kebun yang telah terbangun di dalam kawasan hutan oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian LHK.
  - Dalam rangka identifikasi usaha kebun yang belum teridentifikasi seluas 1.534.024,40 ha perlu melibatkan daerah (Dinas LHK, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT KPH dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) dengan dukungan anggaran dari Kementerian LHK.
  - Mengingat sisa tenggat waktu hanya 1,5 tahun lagi, maka kami mengharapkan Kementerian LHK segera melakukan identifikasi terhadap kebun dalam kawasan hutan.
  - Mengingat dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha kebun sawit dalam kawasan hutan diantaranya banyak jalan yang rusak, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, dll. Gubernur Riau mengusulkan agar PNBP yang diperoleh dari penerbitan sanksi administrasi dapat dibagikan ke daerah dalam bentuk DBH SDA kehutanan.
- Dari paparan yang disampaikan oleh Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, secara garis besar disampaikan gambaran penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya:
  - Data kebun sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau seluas 1.420.610 ha, berbeda dengan yang disampaikan oleh Gubernur Riau.
  - Disampaikan bahwa data kebun sawit yang sudah terbangun yang dimiliki oleh Kementerian LHK berupa polygon-polygon hasil cari interpretasi citra satelit, sedangkan informasi pemilik

kebun tidak dimiliki, sehingga perlu bantuan dari para bupati di Provinsi Riau untuk mengidentifikasi di lapangan.

- Disampaikan juga proses penyelesaian kebun yang sudah terbangun dalam kawasan hutan, sesuai Pasal 110A UU Nomor 11 Tahun 2020.

### c) Gudang PT Pupuk Indonesia (Persero)

- Kesiapan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan padi seluas 60 ribu hektar dengan dasar 6 tepat (yakni **tepat** jenis, **tepat** jumlah, **tepat** harga, **tepat** tempat, **tepat** waktu, dan **tepat** mutu).
- Jumlah pupuk bersubsidi hanya mampu menyediakan 30 persen dari seluruh kebutuhan pupuk bagi kegiatan budi daya. Oleh sebab itu, pemanfaatannya harus betul-betul dapat diterima oleh petani secara 6 enam tepat.
- Kebocoran pupuk bersubsidi ditengarai masih terjadi diberbagai daerah. Oleh sebab itu, kemampuan dan kualitas pengawasan harus terus ditingkatkan oleh PT PIHC sebagai perusahaan yang bertugas dalam menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani se-Indonesia sesuai dengan data yang telah diverifikasi dan disetujui bersama.
- PT PIHC dimintakan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari lini satu dengan sampai lini empat, sehingga penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi semakin dapat diminimalisir.
- Agar penggunaan pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan pupuk oleh petani, maka pendampingan oleh petugas terkait dalam penggunaan pupuk harus lebih ditingkatkan dan diutamakan.

## b. Kunjungan Kerja Spesifik

### 1) Provinsi Jawa Timur (Gresik)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 Januari 2022, dalam rangka meninjau Permasalahan Penyerapan Garam Rakyat, dengan objek kunjungan PT Garam Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik.

#### Temuan hasil kunjungan kerja:

#### a) Petani Garam (Koperasi Bumi Inti Kertasada)

- Pasar garam hasil produksi petani garam rakyat sangat terbatas akibat dari adanya pengelompokan garam konsumsi dan garam industri. Dimana kandungan NaCl garam industri cukup tinggi sehingga saat ini garam industri masih dipenuhi oleh garam impor yang harganya cukup rendah dibandingkan garam lokal.
- Sejak tahun 2021 Koperasi Bumi Inti Kertasada telah melakukan kerja sama dengan PT Garam. Setelah melakukan kerja sama

dengan PT Garam para petani mendapatkan bimbingan serta pendampingan oleh PT Garam mengenai bagaimana memproduksi garam dengan kualitas yang baik hingga mencapai kualitas garam industri. Namun setelah para Petani Garam menjalankan apa yang disarankan oleh PT Garam dengan diawasi oleh teknisi dari PT Garam untuk menghasilkan produk garam dengan kualitas yang lebih baik, pada saat panen raya tiba penyerapan hasil produksi petani garam oleh PT Garam tidak berjalan secara maksimal. Penyerapan baru dilakukan dipenghujung musim dan jumlahnya sedikit (300-350 ton).

#### **b) PT Garam**

- Garam sehat adalah garam yang mengandung NaCl kurang dari 60%. Garam konsumsi serta garam yang dijadikan sebagai bahan baku makanan (industri aneka pangan) sebaiknya garam yang mengandung NaCl tidak lebih dari 60%, sehingga PT Garam merekomendasikan bahwa aneka pangan tidak dimasukkan pada klaster garam industri agar klaster aneka pangan dapat memberikan produk pangan sehat serta dapat membantu penyerapan garam petani lokal.
- Garam industri membutuhkan kandungan NaCl yg cukup tinggi, Ca, Mg, dan cemaran logam cukup rendah, menyebabkan kebutuhan garam sektor industri hingga saat ini masih dipenuhi garam impor. Namun ada kelompok industri, seperti industri aneka pangan yang harusnya tidak dimasukkan pada kelompok garam industri, karena kandungan NaCl yang dibutuhkan oleh industri pangan tidak cukup tinggi dan bisa dicukupi oleh garam yang dihasilkan oleh petani garam lokal. Sehingga volume impor garam dapat ditekan dan penyerapan garam rakyat dapat meningkat jauh lebih baik.
- Berdasarkan data BPS, 10 tahun terakhir Indonesia telah mengimpor garam dan didominasi oleh garam impor dari Australia. Pada tahun 2020 garam impor dari Australia mencapai 85% atau sebanyak 2.2jt ton. Selain itu, pada urutan ke dua garam impor berasal dari India yakni 14% atau sebanyak 373 ton dan selanjutnya garam impor dari China serta negara lainnya. Dibandingkan dari negara-negara lain, harga garam India tergolong lebih murah, yaitu 0.030 dolar atau berkisar Rp440,00/kg, sedangkan harga garam dari Australia yaitu 0.036 dolar atau berkisar Rp523,00/kg.
- Harga garam petani lokal di tahun 2017 mengalami kenaikan cukup drastis dari harga tahun sebelumnya yaitu Rp554,00 menjadi Rp1.927,00 per kg. Harga garam mulai turun di tahun 2018 menjadi Rp1.297,00/kg hingga tahun 2021 harga rata-rata

garam petani lokal turun menjadi Rp467,00/kg seiring dengan meningkatnya impor dan produksi garam dalam negeri.

## 2) Provinsi Riau (Pekanbaru)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Januari 2022, dalam rangka meninjau Lokasi Pengelolaan Hutan Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan objek kunjungan:

- a) Diskusi dengan Gubernur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; dan
- b) Areal Kerja PT Guna Dodos di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

### Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 Tanggal 7 Desember 2016, kawasan hutan di Provinsi Riau adalah seluas 5.406.992 hektar.
- b) Berdasarkan hasil kajian Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES), diperoleh informasi mengenai luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016, yaitu sebagai berikut:

PENGUSAHAAN	FUNGSI KAWASAN HUTAN					Jumlah
	KSA/ KPA	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	
Korporasi	685.79	11,040.79	66,544.28	78,448.13	151,989.56	308,708.55
Masyarakat	5,040.21	245.41	8,558.31	26,488.40	10,553.30	50,885.64
Belum Teridentifikasi	89,464.39	64,192.73	373,690.02	483,406.08	523,271.17	1,534,024.40
<b>Total</b>	<b>95,190.39</b>	<b>75,478.93</b>	<b>448,792.62</b>	<b>588,342.62</b>	<b>685,814.03</b>	<b>1,893,618.59</b>

- c) Sesuai SK Nomor 531/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2021, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan dan telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebanyak 34 perusahaan, dengan areal seluas 104.897,18 hektar. Sedangkan berdasarkan analisa peta, luas areal perkebunan dimaksud adalah 92.497,00 hektar (terdapat selisih seluas 12.400,18 hektar).

### Areal Kerja PT Guna Dodos:

- a) PT Guna Dodos telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Seikijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan di atas areal seluas 850 hektar, sejak sekitar tahun 1990



(sekitar lebih dari 25 tahun) dan saat ini sudah memasuki daur kedua tanaman kelapa sawit yang dikelolanya.

- b) Diperoleh informasi bahwa lahan yang dikelola oleh PT Guna Dodos **tidak memiliki izin** pelepasan kawasan hutan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- c) Berdasarkan keterangan Karyawan PT Guna Dodos yang dijumpai oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, diperoleh informasi bahwa PT Guna Dodos telah mengajukan permohonan izin pelepasan kepada petugas kawasan hutan, namun berdasarkan data yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja, baik yang bersumber dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, PT Guna Dodos tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan serta penegakan hukum atas tindakan kejahatan penggunaan kawasan hutan non prosedural untuk usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Guna Dodos serta perusahaan sejenis bermasalah lainnya.

### 3) Provinsi Bali (Denpasar)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 Januari 2022, dengan objek kunjungan Taman Hutan Raya Mangrove Bali dan TPA Suwung Denpasar untuk meninjau calon lokasi *showcase* acara Presidensi G-20 dan Kondisi terakhir TPA Suwung.

#### Temuan hasil kunjungan kerja:

##### TPA Suwung Denpasar

- a) Kondisi TPA yang memiliki luas  $\pm 32,46$  ha sudah tidak dapat menampung jumlah sampah yang masuk dan Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk menutup TPA Suwung di bulan April 2022.
- b) Penyelesaian sampah di TPA Suwung menjadi kunci untuk menyelesaikan sampah yang berada di Tahura Bali yang akan menjadi lokasi acara Presidensi G20. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan permohonan untuk:
  - Dilakukan revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 dengan mencabut Kota Denpasar sebagai Proyek Strategis Nasional dan membatalkan proyek pengolah sampah menjadi energi listrik TPA Regional Sarbagita.
  - Difasilitasi pembangunan pengolah sampah dengan teknologi RDF dan/atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan untuk mengolah sampah residu di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

- Difasilitasi pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pembangunan TPS 3R, TPST dan/atau PDU serta sarana pengangkut sampah (*dump truck* dan *compactor truck*) pada Desa/Kelurahan dan Desa Adat di Kabupaten/Kota se-Bali.
- c) Wakil Walikota Denpasar menyampaikan bahwa salah satu kendala menyelesaikan permasalahan sampah di TPA Suwung adalah keterbatasan anggaran sehingga memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan Taman Hutan Raya Bali menjadi tempat pembuangan akhir.
- d) Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) dan Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 menyarankan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar agar:
- Sampah yang ada ditumpuk dengan tanah setiap hari secara bergantian agar gunung sampah terikat oleh tanah.
  - mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar tidak mendapatkan alokasi pusat daur ulang, rumah kompos, mesin pencacah, dll yang bersumber dari DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan beberapa kegiatan untuk membantu Pemerintah Provinsi Bali mengelola sampah. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
- Pendampingan dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
  - Pendampingan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik Sekali Pakai.
  - Hingga saat ini baru Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang telah menerbitkan peraturan daerah terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai dan melaksanakan aturan tersebut.
  - Pendampingan untuk menerbitkan kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai dari sektor jasa makanan dan minuman (Hotel, Restoran, Cafe, dll) sebagai implementasi PermenLHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
  - Mendorong penerbitan peraturan desa adat (awig-awig atau pararem) mengenai pengurangan sampah dari sumber dan difokuskan kepada budaya minim sampah.

- Peran desa adat di Bali/Banjar memiliki pengaruh besar dalam kegiatan di masyarakat, oleh karena itu pengelolaan sampah dengan pendekatan peran desa adat sangat diperlukan.
- Mendorong pengembangan TPST seperti TPST SAMTAKU Jimbaran di Kabupaten Badung untuk dapat direplikasi atau diekskalasi penerapannya di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa penerapannya dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta.

### **Taman Hutan Raya Bali**

- a) Lokasi calon *showcase mangrove* di sekitar Estuari Dam, Taman Hutan Raya Bali yang nantinya merupakan lokasi pertemuan dan foto bersama para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara G20. Lokasi di kelilingi tegakan pohon mangrove yang subur dan rapat. Fungsi ekosistem mangrove di sekitar Estuari Dam adalah untuk memfilter air dan sampah agar tidak masuk ke Estuari Dam serta menjaga dam dari pengikisan air laur.
- b) Pekerjaan rehabilitasi fisik dan konstruksi persiapan Presidensi G20 di Kawasan Hutan Mangrove Tahura Bali dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
- c) Untuk menyambut para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20, Taman Hutan Raya Bali akan dilengkapi sarana dan prasarana yang baru dan sarana prasarana yang sudah ada akan ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Sarana baru yang akan dibangun, antara lain: *Production House Area*, *Lobby Area Drop Off*, jalur (*tracking*) kepala negara dan bangunan wantilan. Lokasi berikutnya yang direhabilitasi adalah *Mangrove Information Center* (MIC). Bangunan pendukung yang akan dibangun di MIC, antara lain area *ticketing*, *view deck* Tanjung Benoa dan *tracking* pejalan kaki.
- d) Proses pekerjaan rehabilitasi Tahura Bali yang berkaitan erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan bibit-bibit mangrove yang akan ditanam di Tahura Bali dan didistribusikan ke semua daerah di Bali.

### **4) Provinsi Jawa Tengah (Sragen)**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Februari 2022, dengan objek kunjungan: mengetahui secara langsung kejadian meninggalnya 22 orang petani di Kabupaten Sragen akibat tersengat aliran listrik (jerat tikus listrik) yang dipasang pada areal persawahan serta berdialog dengan petani di lokasi kejadian terkait alasan dan latar belakang menggunakan jerat tikus listrik.

#### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- a) Kejadian musibah meninggalnya 22 orang petani dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. 2022 sebanyak 22 orang akibat jerat tikus listrik, merupakan peristiwa yang tidak perlu terjadi dan sangat menyedihkan.
- b) Meminta kan kepada PT PLN (Persero) untuk membantu upaya pengendalian hama tikus di Kabupaten Sragen dengan memberikan bantuan alat dan bahan pengendalian hama tikus melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- c) Wakil Bupati Sragen menyampaikan, bahwa saat ini sudah tidak ada lagi petani di wilayahnya yang meninggal akibat tersengat jebakan tikus listrik. Pemerintah daerah bekerja sama dengan polisi dan TNI untuk mengawasi dan melarang penggunaan alat jebakan tersebut. Jebakan listrik yang dipasang yang dijumpai oleh Anggota saat kunjungan ke sawah hanya untuk keperluan memperlihatkan contoh bentuk jebakan listrik tikus yang telah banyak memakan korban tersebut.
- d) Dirjen Tanaman Pangan Kementan menyerahkan bantuan alat serta bahan pengendali tikus kepada petani di Kabupaten Sragen.

## **5) Provinsi Jawa Tengah (Semarang)**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Februari 2022, dengan objek kunjungan meninjau Balai Besar Penangkapan Ikan Kota Semarang.

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

Kunjungan kerja di Balai Besar Penangkapan Ikan melihat berbagai hasil inovasi teknologi jenis alat tangkap ikan dan berbagai *warehouse*, seperti:

#### a) Uji Teknik Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Terkait identifikasi dan inventarisasi sumber Teknologi Informasi alat penangkapan ikan, kegiatan perekayasa inovasi dan teknologi alat tangkap bubu kubah, pemanfaatan (*harvest strategy*) pengelolaan perikanan rajungan, kakap dan kerapu serta lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (LPP WPPNRI), sarana penangkapan ikan kapal plat datar dan lain sebagainya.

#### b) Pengujian dan Sertifikasi Produk

Terkait standardisasi dan sertifikasi serta sarana dan prasarana bidang penangkapan ikan, pengelolaan sistem informasi penangkapan ikan dan lain-lain.

- c) Komisi IV DPR RI mendorong Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah inovasi dan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan berbasis komoditas.
- d) Komisi IV DPR RI mendorong Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pembuatan alat serta sertifikasi teknik penangkapan ikan kepada nelayan.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder yang akan melakukan berbagai inovasi, penelitian dan usaha penangkapan ikan.

## **6) Provinsi D. I. Yogyakarta**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Februari 2022, dengan objek kunjungan meninjau kegiatan penanaman tahun ke-1 kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan Bukit Menoreh di Waduk Mini Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- a) Kegiatan Rehabilitasi DAS di Menoreh melibatkan peran serta anggota kelompok tani dalam binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman. Pendamping kegiatan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS ini adalah Penyuluh Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Selain melakukan bimbingan teknis penanaman, pendamping lapangan juga mempunyai tugas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan dan lingkungan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang kehutanan di wilayahnya serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS ini.
- b) Gubernur DIY menyampaikan beberapa hal dan harapan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup di DIY, antara lain:
  - Gubernur DIY berharap program reboisasi di kawasan menoreh agar dilakukan dengan pohon-pohon buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis untuk melindungi dan mencegah Waduk Sermo dari proses pendangkalan.
  - Sehubungan dengan rencana Pemerintah yang akan membangun hotel di kawasan menoreh untuk mendukung program pariwisata, Gubernur DIY berharap agar hotel yang

dibangun tidak merusak hutan yang sudah ada dan memperhatikan kelestarian alam.

### 3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

#### a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 24 Januari 2022 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 memutuskan:
  1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022 dengan lebih cermat dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, yang akan dibahas lebih detil bersama dengan Eselon I pada rapat berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas *Automatic Adjustment* Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment* adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani serta mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk peningkatan ekspor dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.
  3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran sesuai hasil RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian tanggal 15 November 2021, sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk direalokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pengadaan *Combine Harvester* serta realokasi internal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha Tani, Alsintan (TR2, TR4, *Cultivator*, dan *Hand Sprayer*), dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I, sebagai berikut:

- a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - d) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.985.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - h) **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - i) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - j) **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
  - k) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan P2L, Bimbingan Teknis oleh Badan

Ketahanan Pangan. Berkenaan dengan anggaran yang masih diblokir pada proses *Automatic Adjustment* Tahun 2022, agar segera diusulkan untuk dibuka blokir anggarannya kepada Kementerian Keuangan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk non subsidi untuk mengendalikan harga yang melonjak akibat kenaikan bahan baku dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk guna meningkatkan produktivitas lahan petani.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mekanisme pengumpulan data E-RDCK dilakukan setiap 4 tahun sekali dan setiap tahunnya dievaluasi dan diperbaharui serta diawasi secara komprehensif.
7. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan penyaluran aspirasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan.
8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera melakukan tindak lanjut ketentuan penyelenggaraan karantina dalam satu badan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyempurnakan regulasi, terkait perdagangan produk hortikultura dengan adanya penyesuaian atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mempertegas frasa rekomendasi (RIPH) dalam rangka perlindungan kepada petani dan jaminan keamanan produk hortikultura yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
10. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait perlunya relaksasi transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengantisipasi kondisi menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrim serta dampaknya terhadap produksi pangan dan pertanian nasional.

2) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 25 Januari 2022 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 dengan lebih cermat, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan, disamping memberikan dukungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang akan dibahas lebih detil bersama dengan Eselon I pada rapat berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan Rapat Kerja pada minggu kedua bulan Februari 2022 untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tanpa prosedur pelepasan kawasan serta perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana butir 5 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera merealisasikan program/kegiatan berbasis masyarakat serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mulai awal tahun 2022.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari alternatif pelaksanaan program/kegiatan yang sekaligus memberikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

menindaklanjuti butir 4 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021 terkait penganggaran minimal sebesar 40% dari PNBP di Bidang Kehutanan sebagai sumber pendanaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan hidup di lokasi calon ibukota negara.

3) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 26 Januari 2022 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 98,88% atau sebesar Rp4.719.764.614.570,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dari Pagu sebesar Rp4.773.318.817.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan capaian tersebut di tahun 2022.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp296.586.883.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan secara optimal hasil rekomendasi Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan tahun 2022 yang bersifat prioritas dan yang bersentuhan dengan rakyat secara konsisten serta menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan secara masif Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat masih adanya gejolak masyarakat di berbagai daerah.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalin komunikasi secara baik dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar tahun-tahun selanjutnya anggaran KKP dapat meningkat minimal 1% dari APBN, tentunya dengan menaikkan PNBPN di tahun 2022 sebagai potret keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terasa dampak positifnya ke masyarakat.
  6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penguatan integrasi, kolaborasi lintas sektor antar Pemerintah, BUMN, swasta dan stakeholder dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor kelautan perikanan yang akuntabel sebagai wujud upaya melakukan terobosan pencapaian target-target program dan kegiatan yang dicanangkan agar program dan kegiatan dapat sinergi.
  7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membenahi dan memperbaiki sistem tata kelola kelautan perikanan sebagai wujud terjaminnya iklim sistem bisnis usaha sektor kelautan perikanan yang produktif, kondusif, dan responsif sehingga menghadirkan kenyamanan investasi dan terciptanya kesejahteraan dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekspor produk kelautan perikanan berbasis komoditas unggulan dan bernilai ekonomi tinggi.
  8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis program dan kegiatan tahun 2022 termasuk skema permodalan kepada pelaku utama di daerah masing-masing agar memudahkan masyarakat luas cepat mengakses bantuan Pemerintah dalam rangka akselerasi bantuan yang tepat sasaran dan terukur sebagai antisipasi jika ada kebijakan refocusing.
  9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbanyak Badan Layanan Umum (BLU) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai upaya meningkatkan PNBPN tahun 2022, sebagaimana yang telah dilakukan di Politeknik Sidoarjo, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal.
  10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki petunjuk teknis bantuan benih ikan yang sesuai dengan standar agar meminimalisir kematian benih ikan sampai ke kelompok pembudi daya ikan (pokdakan).
- 4) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 14 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait pembukaan blokir di Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp147.300.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diantaranya dialokasikan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
  - a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp175.115.670.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, Rp45.588.572.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp18.233.560.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp26.773.807.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp41.099.262.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp59.489.136.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - g) **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp8.597.879.000,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - h) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp33.480.603.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah);
  - i) **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp262.300.136.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan

- j) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp9.809.623.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk 5 program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani/peternak di daerah antara lain program *vertical dryer* 30 ton dan bengkel alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, , antara lain program *vertical dryer*, bengkel alat mesin pertanian, pupuk organik, pengembangan kawasan peternakan, pengembangan tanaman kelapa, dan pengembangan sayur, buah, serta *combine harvester*.
  4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada sentra-sentra ternak sapi serta tindak lanjut kegiatan panen 100.000 pedet sapi belgian blue.
  5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data importir yang belum menyelesaikan wajib tanam RIPH bawang putih pada tahun 2020.
  6. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi hanya dari lini I hingga kios yang akan dibahas secara mendetil pada rapat selanjutnya.
  7. Komisi IV DPR RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi dana Tugas Pembantuan untuk pengawasan tahun 2023 yang akan digunakan untuk peningkatan efektivitas kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
- 5) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 15 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp296.586.883.000,00** (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
    - a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp27.024.782.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp4.146.321.000,00 (empat miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp36.171.997.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - d) **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp55.796.309.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
  - e) **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp45.391.291.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp18.945.751.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp19.022.809.000,00 (sembilan belas miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
  - h) **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp67.723.598.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
  - i) **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp22.364.025.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas usulan perubahan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
- a) **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp586.852.843.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp621.352.843.000,00 (enam ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp82.552.663.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - c) **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp792.186.368.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar

seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- d) **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, semula sebesar Rp1.126.150.911.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.071.650.911.000,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- e) **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, semula sebesar Rp903.734.145.000,00 (sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp923.734.145.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f) **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp377.207.204.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah);
- g) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp378.741.417.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- h) **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.375.102.199.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- i) **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp493.439.646.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan, agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6) **Rapat Kerja** dengan **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 16 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Data kebun dan pertambangan dalam kawasan hutan memutuskan:

Rapat Komisi IV DPR RI dibuka dan kemudian ditutup hingga dijadwalkan kembali.

- 7) **Rapat Kerja Gabungan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** tanggal 17 Februari 2022 dengan agenda membahas Efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok, Tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi), serta Pasokan dan harga gas untuk produksi produk, memutuskan:

Rapat Kerja Gabungan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dibuka dan ditutup hingga dijadwalkan kembali.

- 8) **Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 17 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Data kebun dan pertambangan dalam kawasan hutan memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2022 sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:

- a) **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp22.361.209.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- b) **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp3.568.522.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp11.742.880.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d) **Direktorat Jenderal Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp59.233.611.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);



- e) **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp72.558.179.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh sembilan ribu rupiah);
  - f) **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp15.021.517.000,00 (lima belas miliar dua puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - g) **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp8.909.668.000,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - h) **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp14.136.670.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - i) **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp9.676.408.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah);
  - j) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp13.196.057.000,00; (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
  - k) **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp11.794.764.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - l) **Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp11.356.417.000,00; (sebelas miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - m) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp13.168.755.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah); serta
  - n) **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp15.239.284.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara.
  3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar

wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendataan serta verifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat tapak.
5. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan terkait dengan persoalan pemindahan hak yang terjadi di lapangan.

## **b. Rapat Dengar Pendapat**

**1) RDP dengan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama BUMN Klaster Pangan** tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda membahas Ketersediaan dan Harga Pangan dan Isu-isu Aktual Lainnya memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional serta pendapatan, kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta ID FOOD untuk menjalin kerja sama, antara lain dengan UMKM dalam pemasaran dan pendistribusian produk.
3. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG agar menyiapkan sarana dan prasarana secara optimal dalam rangka penyerapan beras petani dengan potensi serap sebesar 4,14 juta ton beras hingga Triwulan I Tahun 2022, terutama pada periode bulan Februari-Maret 2022 yang diperkirakan merupakan masa surplus produksi.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar hutang kepada Perum BULOG sebesar

Rp3.924.652.692.654,44 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat koma empat puluh empat rupiah), sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis terkait untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan Perum BULOG.

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah memberikan jaminan penyaluran melalui penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) termasuk dalam kegiatan bantuan sosial Pemerintah.
6. Komisi IV DPR RI meminta ID FOOD secara berkala memperbaharui dan memperbaiki sistem informasi mengenai data pangan seluruh anak perusahaan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.

**2) RDP dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda membahas Penggunaan Anggaran Untuk Peremajaan Sawit dan Kegiatan Lainnya memutuskan:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama BPDPKS terkait kinerja dan pemanfaatan penghimpunan dana, hingga mekanisme penyaluran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI melalui Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat akan memanggil seluruh pihak terkait pengelolaan dana sawit termasuk diantaranya Komite Pengarah BPDPKS dan Perusahaan penerima dana insentif biodiesel.
2. Komisi IV DPR RI mendesak agar penggunaan dana BPDPKS lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit, antara lain melalui peningkatan program intensifikasi sawit rakyat, pelatihan SDM hingga dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebun sawit rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui BPDPKS untuk meningkatkan alokasi penyaluran pada kegiatan intensifikasi untuk optimalisasi hulu produksi sawit di Tahun 2022.
3. Komisi IV DPR RI mendesak BPDPKS untuk segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani peserta peremajaan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan.

3) RDP dengan **Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V** tanggal 18 Januari 2022 dengan agenda membahas Pengelolaan Hutan Pasca-UUCK; a. Rencana pengembangan usaha melalui multi usaha kehutanan, b. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk program perhutanan sosial; Rencana Merger Anak Perusahaan Perum Perhutani memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V mengenai pengelolaan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Multiusaha Kehutanan dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta rencana merger anak perusahaan Perum Perhutani.
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani untuk memberikan penjelasan lebih detail dan gamblang mengenai dampak terhadap keberlanjutan usaha perusahaan maupun konsekuensi kepada kepastian status SDM Perum Perhutani yang harus dilakukan, pasca penetapan penataan kawasan hutan pada areal kerja Perum Perhutani untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
3. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani mengenai tindak lanjut hasil kajian rencana penataan kawasan hutan pada areal Perum Perhutani, untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
4. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d. V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani untuk tidak memberikan pertimbangan teknis atas semua permohonan pertambangan batuan (dahulu pertambangan galian c), apabila berpotensi memberikan dampak kerusakan pada lingkungan.
6. Komisi IV DPR RI meminta PT Inhutani IV untuk melakukan survei lapangan terkait kejadian penebangan secara ilegal oleh masyarakat di Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan laporan hasil survei kepada

Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat hari ini.

7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini selambatnya pada tanggal 24 Januari 2022.

**4) RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian** tanggal 2 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian (diantaranya, benih berkualitas dan pupuk organik) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, untuk selanjutnya akan dibahas pada rapat berikutnya.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data-data antara lain, Data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk bersubsidi tahun 2020-2021 sebagai bahan pada RDP hari Kamis tanggal 3 Februari 2022.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian agar dalam melaksanakan kegiatan dan program dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria teknis agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk pada kegiatan penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.

**5) RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company** tanggal 3 Februari 2022 dengan agenda membahas Permasalahan Pupuk memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data spasial dari luasan tanam komoditas yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya diajukan usulan penerima oleh Gubernur

dan Bupati berdasarkan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

2. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah agar alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan menjadi tupoksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan.
3. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan penilaian kinerja distributor dan pengecer di daerah dan mendesak PT PIHC untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi yang melakukan pelanggaran.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
5. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan pemantauan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini I sampai IV.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan tindaklanjut rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani selambat-lambatnya mulai Juli 2022.

**6) RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove** tanggal 7 Februari 2022 dengan agenda membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pokok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memperbaiki kinerja dengan meningkatkan jumlah Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK), baik di pusat dan maupun di daerah, dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan, sebelum diserahkan kepada pihak penerima bantuan dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta data lainnya selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2022, sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Februari 2022.

**7) RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan** tanggal 9 Februari 2022 dengan agenda *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat, tepat, dan berkomitmen tidak melakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) program dan kegiatan tahun 2022 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan, agar ekonomi nasional dapat tumbuh dan bangkit.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing sehingga nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di masing-masing daerah dapat terbantu dan bantuannya tidak terbengkalai/mangkrak.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. Selanjutnya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan

data PHLN selambat-lambatnya sebelum rapat kerja yang akan datang.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya dan akan diputuskan pada rapat kerja yang akan datang.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan terjadi IUU Fishing.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di BLU-LPMUKP dapat direalisasikan kepada sektor usaha.

#### **c. Rapat Dengar Pendapat Umum**

-

#### **4. Audiensi**

-

#### **3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen**

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

**Set. Komisi IV DPR RI**